

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Saat ini, pemerintah daerah harus dapat mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki. Salah satunya dengan cara meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam meningkatkan PAD pemerintah Kota Padang harus mengenali dan mengidentifikasi sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Diantara sumber-sumber pendapatan tersebut, salah satunya pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang dapat meningkatkan PAD.

Semakin banyaknya fasilitas jalan yang dibangun pemerintah maka akan semakin banyak kendaraan bermotor di Kota Padang. Karena saat ini, pembelian kendaraan bermotor apalagi roda dua bisa dilakukan dengan kredit sehingga dengan membayar DP Rp. 500.000 masyarakat sudah bisa mendapatkan satu kendaraan bermotor. Dengan meningkatnya jumlah kepemilikan kendaraan bermotor di Kota Padang mengakibatkan terjadinya peningkatan penerimaan di sektor pajak kendaraan bermotor.

Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang dipungut atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor. Pengertian tersebut dapat ditemukan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

Dalam pelaksanaan prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor, para petugas dituntut untuk dapat meningkatkan kualitas administrasi dan operasional secara profesional. Hal ini bertujuan agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan cepat bagi wajib pajak serta tetap dapat membuat laporan pendapatan pajak yang lebih baik dan akurat. Sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor harus dilakukan dengan efektif agar tidak terjadi penyimpangan atau kesalahan terhadap prosedur maupun dokumen-dokumen dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor.

Prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor agar berjalan dengan lancar maka harus diimbangi dengan usaha yang lebih efektif, baik dalam sistem pencatatan atau pengolahan data. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengendalian internal agar dalam pelaksanaan prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor dapat berjalan dengan baik dan efektif.

Dari penelitian yang dilakukan penulis dikantor bersama SAMSAT Kota Padang bahwa dengan bertambahnya jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran PKB, maka semakin banyak tugas yang dilakukan oleh petugas dalam pelayanan pemungutan pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut memungkinkan adanya kendala atau masalah yang terjadi dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor. Misalnya terjadi kesalahan dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor karena faktor kelalaian yang dilakukan petugas.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal memiliki peranan yang sangat penting dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor khususnya di Kota Padang. Adanya pengendalian internal yang baik berarti adanya pengawasan yang baik pula dalam melaksanakan setiap kegiatan manajemen,

sehingga ada satu kesatuan kerja yang tak terpisahkan dalam mencapai tujuan perusahaan. Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengambil judul **“Analisis Implementasi Sistem Pengendalian Internal dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (studi kasus pada Kantor SAMSAT Kota Padang)”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, masalah yang akan dibahas didalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi sistem pengendalian internal dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor? Apakah pelaksanaan dari komponen sistem pengendalian intern dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kota Padang sudah memadai?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui implementasi sistem pengendalian internal dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT dan mengetahui apakah sudah memadai dengan komponen sistem pengendalian internal.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi penulis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi di universitas andalas dan diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis

terutama tentang implementasi sistem pengendalian internal dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor

2. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi perpustakaan dan juga dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya yang memiliki objek penelitian yang sama

3. Bagi Kantor SAMSAT

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja SAMSAT dalam upaya meningkatkan pelayanan dan penerimaan dari sektor pajak kendaraan bermotor melalui SAMSAT.

### 1.5 Sitematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

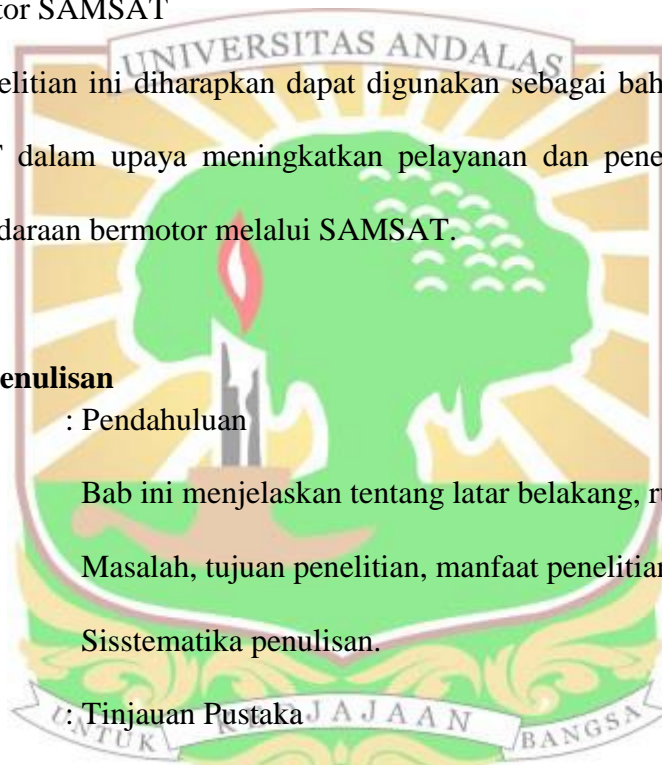
Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan Masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan Sisstematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisikan landasan teori-teori yang mendukung dalam analisis perumusan masalah. Bab ini juga menampilkan kerangka pemikiran penelitian yang akan diteliti.

BAB III : Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, batasan masalah, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.



BAB IV : Pembahasan

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian dan hasil analisis dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan hasil analisa data dan saran yang dianggap perlu untuk penelitian selanjutnya.

